



---

## **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS, INVENTORY INTENSITY, CAPITAL INTENSITY, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS**

**Jihan Nurislam, Alfiati Silfi**

Universitas Riau

Email: [jihannurislam25@gmail.com](mailto:jihannurislam25@gmail.com)

---

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research was to obtain empirical evidence about the influence of Firm Size, Board of Commissioners, Inventory intensity, Capital intensity, Leverage toward Tax aggressiveness (empirical study on manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange for the period 2018-2020). The population in this study were all Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. The samples in this study were 67 companies that were studied for 3 years, so the total sample amounted to 201. The method of determining the sample used in this study was purposive sampling while the data processing method used in this study is multiple regression analysis using software SPSS version 25 to process data.*

*The results of this study indicate that the firm size variable has no effect on tax aggressiveness with a significant value of  $0,952 > 0,05$ . The Board of Commissioners has an effect on Tax aggressiveness with a significant value of  $0,000 > 0,05$ . Inventory intensity has an effect on Tax aggressiveness with a significant value of  $0,000 < 0,05$ , Capital intensity has no effect on Tax aggressiveness with a significant value of  $0,225 > 0,05$ . Leverage has an effect on Tax aggressiveness with a significant value of  $0,000 < 0,05$ .*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, *Inventory intensity*, *Capital intensity*, *Leverage* terhadap *Tax aggressiveness* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 67 perusahaan yang diteliti selama 3 tahun, sehingga total sampel berjumlah 201. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 25 untuk mengolah data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax aggressiveness* dengan nilai signifikan sebesar  $0,952 > 0,05$ . Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Tax aggressiveness* dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 > 0,05$ . *Inventory intensity* Komisaris berpengaruh terhadap *Tax aggressiveness* dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax aggressiveness* dengan nilai signifikan sebesar  $0,225 > 0,05$ . *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax aggressiveness* dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .



**Kata Kunci:** Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, *Inventory intensity*, *Capital intensity*, *Leverage*, *Tax Aggressiveness*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Pajak termasuk sumber penerimaan utama guna memenuhi kebutuhan negara untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat umum. Penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan merupakan beban yang harus dibayar bagi para wajib pajak (Wulansari *et al.*, 2020). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak.

Dengan pendapat itu maka semakin besar pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha atau perusahaan, maka semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak, hal ini berbeda kepentingan antara negara menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin untuk keuntungan perusahaan dan menimbulkan ketidak patuhan yang dilakukan perusahaan untuk melakukan *tax aggressiveness*.

*Tax aggressiveness* adalah suatu tindakan mengurangi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan (*tax planning*) baik itu dengan cara legal (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya yang tidak melanggar peraturan perpajakan maupun ilegal (*tax evasion*) dilakukan dengan cara menyembuyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak. Semakin besarnya kemungkinan perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak.



Ada beberapa yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan *tax aggressiveness* yang tergolong *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak yang ada pada PPh pasal 6 ayat 1b, misalnya dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Dan juga dapat memanfaatkan peraturan PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek pajak dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan objek pajak, misalnya, perseroan terbatas (PT) dapat berinvestasi pada perusahaan atau badan usaha di Indonesia, dan dividen yang diterima oleh PT akan dikategorikan sebagai pendapatan yang tidak termasuk objek pajak dengan syarat dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit harus sebesar 30% dari laba setelah pajak dan dividen yang berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek harus diinvestasikan di Indonesia sebelum Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen.

Penetapan tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 sebesar 22% yang berlaku pada 2020 hingga tahun pajak 2021 yang sebelumnya sebesar 25%. Penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) untuk mengukur tingkat penghindaran pajak perusahaan karena proksi ini dapat mengukur secara langsung arus kas keluar yang digunakan perusahaan untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran ini juga mampu menggambarkan pengelolaan pajak jangka pendek yang dibayar dengan uang tunai.

#### Penerimaan Pajak Periode 2018-2020 (Triliun Rupiah)

Keterangan	2018	2019	2020
Target	1424.00	1577.56	1198.80
Realisasi	1315.51	1332.06	1070.00
Capaian	92.38	84.44	89.25

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Dalam periode tiga tahun, persentase capaian penerimaan pajak selalu konsisten berada di atas 80%. Kendati demikian, terdapat penurunan yang cukup tajam pada 2019 apabila dibandingkan dengan capaian 2018. Sedangkan penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 1.070 triliun. Angka



tersebut kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada 2019 yang mencapai Rp 1.332,7 triliun. Faktor-faktor utama penurunan tersebut antara lain adanya restitusi yang meningkat sebesar 21,11%, moderasi harga komoditas di pasar global yang menyebabkan turunnya pertumbuhan penerimaan dari sektor pertambangan dan sawit, normalisasi aktivitas impor, serta masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur. Praktik penghindaran pajak membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah besar. Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi.

Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Dus, korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.1, Kementerian Keuangan mematok target penerimaan pajak di tahun 2020 mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16% dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun. Tax Justice Network memadankan dalam situasi pandemi saat ini, jumlah penghindaran pajak itu setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila merujuk stimulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak bisa menutupi 70,5% dari total batas pengeluaran tertinggi kesehatan senilai Rp 97,26 triliun. Angka penghindaran pajak itu pun lebih besar daripada batas pengeluaran tertinggi stimulus sektoral, kementerian/lembaga, pemda di program PEN yakni Rp 65,97 triliun atau anggaran pembiayaan korporasi senilai Rp 62,22 triliun. Adapun, dalam *The*



*State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* memosisikan Indonesia di peringkat keempat se-Asia setelah China, India (Santoso, 2020)

Penerimaan pajak sampai dengan akhir April 2020 tercatat turun 3,09% secara tahunan. Namun, di tengah lesunya pos penerimaan pajak terbesar itu, dua sektor usaha yakni manufaktur dan jasa keuangan masih bisa menopang kinerja pajak di saat empat sektor lain yang kontraksi. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan, penerimaan pajak sepanjang Januari sampai dengan April 2020 sebesar Rp 376,67 triliun. Berdasarkan jenis dunia usaha, realisasi penerimaan pajak sektor industri manufaktur senilai Rp 108,36 triliun setara 29,5% dari total realisasi penerimaan pajak (Santoso, 2020). Terdapat beberapa faktor yang di duga mempunyai pengaruh terhadap *tax aggressiveness* dalam suatu perusahaan, diantaranya adalah ukuran perusahaan, dewan komisaris, *inventory intensity*, *capital intensity* dan *leverage*. Ukuran perusahaan menunjukkan identitas perusahaan baik skala kecil maupun skala besar. Menurut (Anggadinata dan Cahyaningsih, 2020) secara umum ukuran perusahaan dapat dijelaskan sebagai suatu perbandingan antara besar dan kecilnya suatu objek. Semakin besar nilai total penjualan, kapitalisasi pasar, dan total aset maka semakin besar ukuran perusahaan. Semakin besar total aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar perusahaan dikenal di masyarakat dan semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang. Total aset dan jumlah penjualan dapat menjadi sebuah alat untuk mengukur ukuran perusahaan. Secara umum ukuran perusahaan dapat dijelaskan sebagai suatu perbandingan antara besar dan kecilnya suatu objek. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin diawasi oleh pemerintah dan hal ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau *tax avoidance* penghindaran pajak (Kurniasih dan Sari, 2013) Perusahaan dalam skala besar tentu mempunyai pengalaman lebih lama untuk melakukan operasinya, dan mempunyai pengalaman yang lebih dalam strategi untuk keberlanjutan operasinya, tak terkecuali tindakan meminimalkan pajak

Menurut peraturan OJK No.60 /POJK.04/2016 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpangan Dan Penyelesaian menyebutkan bahwa: “Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang



bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Dewan komisaris berkewajiban mengawasi kebijakan direksi dalam rangka mengelola perusahaan dan memberi arahan atau nasihat kepada direksi agar perusahaan berjalan secara efektif. Dewan komisaris lebih berfokus pada fungsi pengawasan dan penerapan kebijakan direksi. Peran penting dewan komisaris untuk menuntun strategi dan memperhatikan direksi termasuk di dalamnya terkait perencanaan pajak.

*Inventory intensity* atau intensitas persediaan yaitu suatu ukuran yang dihitung dengan cara membandingkan total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Rodríguez & Arias, 2012). Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka beban pajak yang harus dibayar akan berkurang dan meningkatkan laba menjelaskan bahwa semakin tinggi intensitas persediaan maka tingkat *tax aggressiveness* juga meningkat.

Faktor berikutnya yang memengaruhi *tax aggressiveness* yang lainnya yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* rasio didefinisikan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap persediaan. Aset tetap yang dimaksud adalah aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan. (Siregar dan Widyawati, 2016) Rasio investasi dalam bentuk aset tetap merupakan suatu bentuk keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghemat pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena hampir semua aset tetap kecuali tanah mengalami penyusutan. Biaya penyusutan aset tetap ini merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga beban pajak juga akan berkurang karena adanya biaya penyusutan aset tetap. Maka semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin besar pula biaya penyusutan yang dapat dikurangkan untuk menghemat pajak.

Adapun kinerja yang memengaruhi *tax aggressiveness* yaitu *leverage*. Menurut (Maulana, 2020) *leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal



sendiri. Biasanya perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan menjelaskan informasi secara detail dalam laporan keuangan sebagai cara untuk menghindari biaya pengawasan oleh investor dibandingkan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah. (Multazam dan Rahmawaty, 2018) menyatakan semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi tindakan *tax aggressiveness* perusahaan karena perusahaan sengaja berutang untuk membiayai operasional perusahaan yang implikasinya terhadap pengurangan pajak akibat adanya bunga pinjaman tersebut. *Leverage* yang tinggi memberikan manfaat pengurangan pajak berupa beban bunga dan menyebabkan laba operasi lebih besar.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi diandaikan setidaknya terdapat dua pelaku yang berhubungan, yakni prinsipal (*principal*) dan agen (*agent*). Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara principal yang memiliki wewenang dengan agent atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Teori keagenan juga meimplementasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai agen moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga muncul informasi asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earning management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Amelia, 2015).

Perbedaan kepentingan dengan prinsipal dan agen dapat memengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan. Salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh



pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assesment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan oleh pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak principal.

## 2.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan cabang riset akademis pada area akuntansi yang berfokus pada penjelasan dan prediksi praktik akuntansi. Teori akuntansi positif mencoba untuk memahami dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi yang akan ditetapkan oleh perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1990). Teori akuntansi positif memaparkan suatu teori akuntansi yang berusaha mengungkapkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Watts dan Zimmerman (1990) mengemukakan tiga hipotesis yang mendasari pemilihan metode akuntansi untuk perusahaan, yaitu:

1. Hipotesis Rencana Bonus
2. Hipotesis Debt Covenant
3. Hipotesis Biaya Politik

## 2.3 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI) pada tahun 1963. Teori *stakeholder* mendefinisikan bahwa suatu organisasi tidak akan ada tanpa suatu kelompok yang memengaruhi serta mendukung organisasi tersebut. Teori ini juga menjelaskan bahwa perusahaan bukan organisasi atau entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun perusahaan juga harus memberikan manfaat untuk *stakeholder* nya (Ghozali dan Chariri, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari *stakeholder* kepada perusahaan. *Stakeholder* adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi maupun aktivitas perusahaan dan karenanya kelompok tersebut dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh perusahaan. *Stakeholder* dalam perusahaan antara lain:



investor, kreditor, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

*Stakeholder* memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau dapat mengendalikan pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. pengendalian tersebut dapat berupa mengendalikan sumber ekonomi yang terbatas, dalam hal ini yakni modal dan tenaga kerja, akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk memengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori *stakeholder* dapat dilihat dari tiga pendekatan. Dilihat dari pendekatan deskriptif, teori *stakeholder* menjelaskan bahwa *stakeholder* secara sederhana merupakan deskripsi atas realitas perusahaan mengenai bagaimana perusahaan beroperasi. Dalam pendekatan deskriptif, teori *stakeholder* memiliki tujuan untuk memahami bagaimana manajer menangani kepentingan para *stakeholder* dengan tetap menjalankan kepentingan perusahaan. Dilihat dari pendekatan instrumental, salah satu strategi manajer dalam menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik yaitu dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholder*. Kemudian dilihat dari pendekatan normatif, *stakeholder* yang telah memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan memiliki hak moral untuk menerima imbalan atau rewards dari perusahaan. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pedoman moral atau filosofis terkait dengan aktivitas perusahaan maupun manajemen perusahaan.

*Tax aggressiveness* merupakan tindakan manajemen perusahaan yang tidak mengindahkan kepentingan *stakeholder*. Dalam hal ini, pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* perlu diperhatikan kepentingannya oleh manajemen perusahaan terkait keputusan yang diambil. Kepentingan pemerintah perlu diperhatikan perusahaan, dapat dilakukan dalam bentuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan, salah satunya peraturan perpajakan. Pemerintah sebagai *stakeholder* juga telah berkontribusi terhadap perusahaan dengan menyediakan infrastruktur dan pasar bagi perusahaan. Maka pemerintah memiliki hak moral untuk mendapat imbalan atau rewards, salah satunya adalah pajak yang harus dibayar perusahaan. Tindakan *tax aggressiveness* yang dilakukan perusahaan akan merugikan pemerintah dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori *stakeholder* dalam penelitian ini diterapkan untuk



mengidentifikasi variabel ukuran perusahaan, dewan komisaris, *inventory intensity*, *capital intensity*, dan *leverage* dalam hubungannya dengan *tax aggressiveness*. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dinilai dapat membatasi atau meminimalisir tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan tindakan *tax aggressiveness*.

#### **2.4 Tax Aggressiveness**

Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut (Anggadinata dan Cahyaningsih, 2020), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) disebut dengan *tax aggressiveness* perusahaan. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif. Pertimbangan untuk membayar pajak secara efisien yang mendorong perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

(Menurut Hlaing, 2012) dalam (Nugraha, 2015) *tax aggressiveness* didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Jenis transaksi umum *tax aggressiveness* yang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajaknya yaitu penggunaan utang perusahaan secara berlebihan dengan mengklaim beban bunga secara berlebih serta penggunaan kerugian pajak secara berlebihan. Manfaat *tax aggressiveness* perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang. Sedangkan kerugian dari *tax aggressiveness* perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi dari kantor pajak berupa denda serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan negara dalam sektor pajak (Suyanto dan Supomo, 2012).



### 3. METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru, Riau dengan mengunduh laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*) dari laman resmi Bursa Efek Indonesia dengan alamat [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan laman perusahaan sampel dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2021. Tujuan studi penelitian ini adalah studi kausal dengan maksud untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain atau untuk menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang menyebabkan masalah (Sekaran dan Bougie, 2017). Unit analisis menurut (Sekaran dan Bougie, 2017) adalah tingkat kesatuan data terdiri atas individu, pasangan, kelompok, divisi, industri atau perusahaan, dan kebudayaan yang dikumpulkan selama tahap analisis. Pada penelitian ini, unit analisis berupa perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2020.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018 sampai 2020. Total populasi pada penelitian ini adalah 195 perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sampel adalah dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel. Metode *purposive sampling* adalah metode penentuan sampel dimana sampel yang terpilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti dan dipilih dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mendapatkan sampel yang representatif. Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2018-2020.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan data keuangan lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2018-2020.
3. Perusahaan manufaktur yang menggunakan satuan mata uang rupiah selama tahun 2018-2020



4. Perusahaan tidak mengalami kerugian agar tidak menyebabkan distorsi dalam pengukuran *tax aggressiveness*

Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini:

#### Sample Penelitian

Keterangan	Jumlah
Populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020	195
Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama periode penelitian yaitu tahun 2018-2020	(30)
Perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan dan data keuangan lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2018-2020	(25)
Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(29)
Perusahaan mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu tahun 2018-2020	(44)
Jumlah Sampel	67
Tahun Pengamatan	3
<b>Total Sampel</b>	<b>201</b>

Sumber: Data Oahan

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang mana bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2020.

Sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Sumber data yang digunakan ini diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan yang terdapat di situs BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sekaran dan Bougie, 2017), ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yaitu interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), pengukuran fisik, dan metode umum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode



dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan peristiwa yang telah lalu, dalam hal ini laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan dari tahun 2018 hingga 2020 serta data pendukung lainnya berupa literatur-literatur terdahulu seperti jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Dari hasil pengujian statistik deskriptif, maka diperoleh hasil seperti tabel berikut:

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax aggressiveness</i>	201	.0100	.8972	.274814	.1656590
Ukuran Perusahaan	201	25.9547	33.4945	28.793683	1.4680719
Dewan Komisaris	201	2	9	4.38	1.859
<i>Inventory intensity</i>	201	.0022	1.9908	.197784	.1776635
<i>Capital intensity</i>	201	.0004	6.3784	.514882	.7678394
<i>Leverage</i>	201	.0020	6.6062	.701902	1.2931063
Unstandardized Residual	201	-.54792	.43818	.0000000	.11744356
Valid N (listwise)	201				

Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel untuk variabel *Tax aggressiveness* menunjukkan nilai minimum 0,0100 dan nilai maximum 0,8972 dengan rata-rata variabel *Tax aggressiveness* yang dimiliki oleh 67 perusahaan sampel periode 2018-2020 adalah sebesar 0,274814 dengan nilai standar deviasi variabel *Tax aggressiveness* sebesar 0,1656590, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih tinggi dikarenakan nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi.

Selanjutnya, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai minimum 25,9547 dan nilai



maximum 33,4945 dengan rata-rata variabel ukuran perusahaan yang dimiliki oleh 67 perusahaan sampel periode 2018 -2020 adalah sebesar 28, 793683 dengan nilai standar deviasi variabel ukuran perusahaan sebesar 1,4680719, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih tinggi dikarenakan nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Ukuran dewan komisaris menunjukkan nilai minimum 2 dan nilai maximum 9 dengan rata-rata variabel ukuran perusahaan yang dimiliki oleh 67 perusahaan sampel periode 2018 -2020 adalah sebesar 4,38 dengan nilai standar deviasi variabel ukuran perusahaan sebesar 1,859, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih tinggi dikarenakan nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap *Inventory intensity* menunjukkan nilai minimum 0,0022 dan nilai maximum 1,9908 dengan rata-rata variabel ukuran perusahaan yang dimiliki oleh 67 perusahaan sampel periode 2018-2020 adalah sebesar 1,97784 dengan nilai standar deviasi variabel ukuran perusahaan sebesar 1,776635, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih tinggi dikarenakan nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap *Capital intensity* menunjukkan nilai minimum 0,0004 dan nilai maximum 6,3784 dengan rata-rata variabel ukuran perusahaan yang dimiliki oleh 67 perusahaan sampel periode 2018 -2020 adalah sebesar 0,514882 dengan nilai standar deviasi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,7678394, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih rendah dikarenakan nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi.

Selanjutnya, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap *Leverage* menunjukkan nilai minimum 0,0020 dan nilai maximum 6,6062 dengan rata-rata variabel ukuran perusahaan yang dimiliki oleh 67 perusahaan sampel periode 2018 -2020 adalah sebesar 0,701902 dengan nilai standar deviasi variabel ukuran perusahaan sebesar 1,2931063, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih rendah dikarenakan nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi.

## 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

### 4.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat dari tabel *kolmogorov-smirnov* seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		201
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11744356
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.063
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.004 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

**Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2022)**

Hasil uji normal menormalkan distribusi data. Hasil uji normalitas data setelah transformasi adalah sebagai berikut: itas diatas menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal karena probability valuenya  $< 0,05$  sehingga harus ditransformasi agar data terdistribusi secara normal. Perlakuan terhadap data yang tidak normal adalah dengan melakukan transformasi atau mengubah data ke dalam bentuk ln (logaritma natural) untuk memperkecil skala ukuran data dan untuk menormalkan distribusi data. Hasil uji normalitas data setelah transformasi adalah sebagai berikut:

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		201
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.53134950
Most Extreme Differences	Absolute	.062



	Positive	.052
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062 <sup>c</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

**Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2022)**

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, terlihat bahwa data nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai normalitas dari *residual* data *tax aggressiveness*, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, *Inventory intensity*, *Capital intensity* *Leverage*, sebesar  $0,062 > 0,05$ , maka bisa disimpulkan distribusi data variabel memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat adanya keterkaitan antara variabel independen, atau dengan kata lain setiap variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan VIF. Multikolinieritas tidak terjadi bila nilai *tolerance value* diatas 0,1 atau nilai VIF dibawah 10. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel berikut ini:

#### Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ukuran Perusahaan	.718	1.392
	Dewan Komisaris	.723	1.383
	<i>Inventory intensity</i>	.975	1.025
	<i>Capital intensity</i>	.583	1.716
	<i>Leverage</i>	.578	1.730

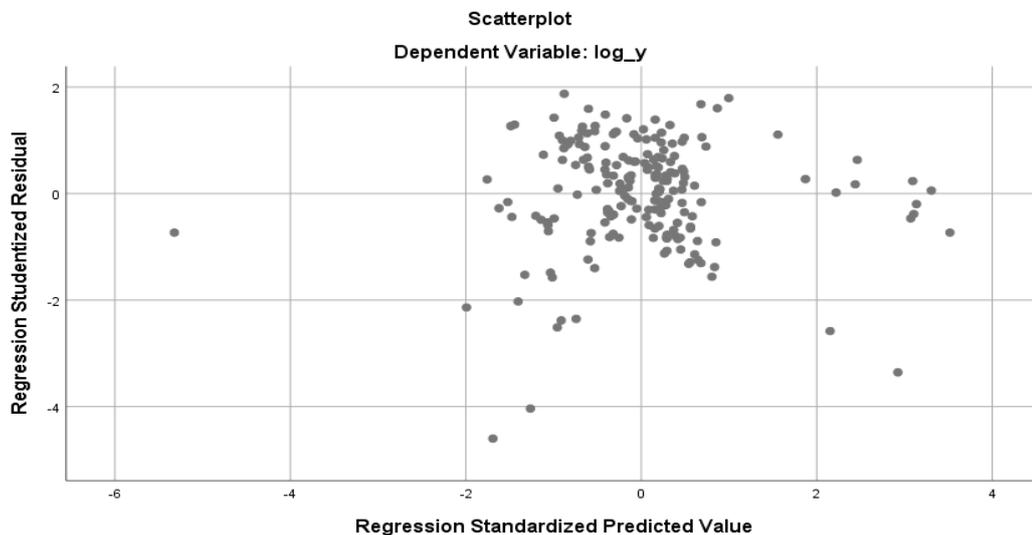
**Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2022)**

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel-variabel independen yang diteliti.

#### 4.4 Uji Heterokedastisitas

Tujuan dilakukan pengujian heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varians dan residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Heterokedastisitas ini dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik pada *scatterplot* membentuk pola tertentu berarti regresi mengalami gangguan. Sebaliknya jika diagram pencar tidak membentuk suatu pola tertentu (menyebarkan) berarti regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot* dibawah ini:

#### Hasil Uji Heteroskedestisitas



**Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2022)**

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik- titik menyebar secara acak, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

#### 4.5 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2018S). Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ini dapat dilakukan dengan berbagai uji yang dilakukan. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Waston. Kriteria yang



digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah sebagai berikut :

$H_0$  : tidak ada autokorelasi ( $r = 0$ )

$H_A$  : tidak ada autokorelasi ( $r \neq 0$ )

### Hasil Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.605 <sup>a</sup>	.366	.349	.53812	2.083

a. Predictors: (Constant), *Leverage* , Ukuran Dewan Komisaris, *Inventory intensity*, SIZE, *Capital intensity*

b. Dependent Variable: log\_y

Pada tabel di atas terlihat bahwa hasil uji Durbin Watson menunjukkan angka 2,083. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikan 1% dengan jumlah sampel 89 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka di tabel Durbin Watson tes bound akan diperoleh nilai sebagai berikut:

$$d_u = 1,8232$$

$$d_l = 1,7184$$

$$DW = 2,083$$

$$\text{Jadi } 4 - d_u = 4 - 1,8232 = 2,1768$$

$$d_u < d < 4 - d_u$$

$$1,8232 < 2,083 < 2,1768$$

Oleh karena nilai DW 2,083 lebih besar dari batas atas ( $d_u$ ) 1,8232 dan kurang dari  $4 - d_u = 2,1768$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model yang dirancang dalam penelitian ini melibatkan 6 variabel, yaitu *Tax aggressiveness* sebagai variabel dependen dengan ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, *Inventory intensity*, *Capital intensity* dan *Leverage* sebagai variabel independen.

### Hasil Analisis Regresi Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.859	.842		-1.020	.309
	Ukuran Perusahaan	-.002	.031	-.004	-.060	.952
	Dewan Komisaris	-.110	.024	-.307	-4.578	.000
	<i>Inventory intensity</i>	-.973	.217	-.259	-4.487	.000
	<i>Capital intensity</i>	-.079	.065	-.091	-1.218	.225
	<i>Leverage</i>	.218	.039	.422	5.621	.000

a. Dependent Variable: log<sub>y</sub>

**Sumber:** Output SPSS (Data Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = -0,859 - 0,002X_1 - 0,110X_2 - 0,973X_3 - 0,079X_4 + 0,218X_5 + e$$

Persamaan regresi di atas mempunyai makna sebagai berikut:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) adalah 0,859 dan bertanda negatif. Hal ini berarti jika ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, *Inventory intensity* dan *Capital intensity* bernilai 0, maka nilai *tax aggressiveness* sebesar -0,859.
- Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan adalah -0,002 dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada ukuran perusahaan dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menurunkan nilai *Tax aggressiveness* sebesar 0,002.
- Nilai koefisien regresi dewan komisaris adalah -0,110 dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada dewan komisaris dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menurunkan nilai *Tax aggressiveness* sebesar 0,110.
- Nilai koefisien regresi *Inventory intensity* adalah -0,973 dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada *inventory intensity* dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menurunkan nilai *Tax aggressiveness* sebesar 0,973.
- Nilai koefisien regresi *Capital intensity* adalah -0,079 dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada *Capital intensity*

dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menurunkan nilai *Tax aggressiveness* sebesar 0,079.

- f. Nilai koefisien regresi *Leverage* adalah 0,218 dan bertanda positif . Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada *Leverage* dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menaikkan nilai *Tax aggressiveness* sebesar 0,218.

#### 4.7 Uji Hipotesis

##### 4.7.1 Uji t

Dalam mengetahui apakah variabel independen (ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, *Inventory intensity*, *Capital intensity* dan *Leverage*) memiliki hubungan dengan *tax aggressiveness* dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel dan nilai *probabilitas* (sig) ketentuan tentang ditolaknya  $H_0$  jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel, dan nilai *probabilitas* lebih kecil dari nilai alpha 0,05 yang memiliki arti bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel independen secara individual/parsial dengan variabel dependen, maka dengan itu diperlukan pengujian dengan menggunakan uji statistik antara lain:

##### Hasil Uji t

Model		t	Sig.	keterangan
1	(Constant)	-1.020	.309	
	Ukuran Perusahaan	-0.060	.952	Tidak berpengaruh
	Dewan Komisaris	-4.578	.000	Berpengaruh
	<i>Inventory intensity</i>	-4.487	.000	Berpengaruh
	<i>Capital intensity</i>	-1.218	.225	Tidak berpengaruh
	<i>Leverage</i>	5.621	.000	Berpengaruh

a. Dependent Variable: LogY

##### Pengujian Hipotesis 1

Variable Ukuran perusahaan memiliki t hitung sebesar -0.060 dan memiliki nilai sig sebesar  $0.952 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_1$  ditolak yang artinya variable ukuran perusahaan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.



## Pengujian Hipotesis 2

variable Ukuran dewan komisaris memiliki t hitung sebesar -4.578 dan memiliki nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima yang artinya variable ukuran dewan komisaris (X2) berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

## Pengujian Hipotesis 3

Variable *Inventory intensity* memiliki t hitung sebesar -4,487 dan memiliki nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima yang artinya variable ukuran *Inventory intensity* (X3) berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

## Pengujian Hipotesis 4

Variabel *Capital intensity* memiliki t hitung sebesar -1,218 dan memiliki nilai sig sebesar  $0,225 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak yang artinya variable *Capital intensity* (X2) tidak berpengaruh *tax aggressiveness*.

## Pengujian Hipotesis 5

Ukuran dewan komisaris memiliki t hitung sebesar 5.621 dan memiliki nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H5 diterima yang artinya variable *Leverage* (X5) berpengaruh *tax aggressiveness*.

### 4.7.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya persentase variabel independen (ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, *Inventory intensity*, *Capital intensity* dan *Leverage*) dapat menjelaskan variabel dependen (*Tax Aggressiveness*). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 <sup>a</sup>	.366	.349	.53812

a. Predictors: (Constant), *Leverage*, Ukuran Dewan Komisaris, *Inventory intensity*, SIZE, *Capital intensity*

b. Dependent Variable: log\_y



**Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2022)**

Dari tabel diatas diperoleh *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,366. Dengan demikian variabel ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, *Inventory intensity*, *Capital intensity* dan *Leverage* dapat menjelaskan variabel *Tax aggressiveness* sebesar 36,6%. Sedangkan sisanya sebesar 63,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax aggressiveness*. Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Tax aggressiveness*. *Inventory intensity* Komisaris berpengaruh terhadap *Tax aggressiveness*. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax aggressiveness*, dan *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 163–176.
- Amelia, Vicky (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No.1, p. 1–127.
- Anggadinata, S.R. dan Cahyaningsih. (2020), "Factors to Influence Tax Aggressiveness (Study on Basic and Chemical Industrial Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for The Period 2016-2018)", *e-Proceeding of Management*, Vol. 7 No. 2, hal. 5690–5696.
- Brigham, Eugene F dan Houston. (2006). *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Chariri dan Imam Ghozali. (2007). "Teori Akuntansi". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chiou, Y., Hsieh, Y., & Lin, W. (2014). *Journal Of Economic & Financial Studies Determinants Of Effective Tax Rates For Firms Listed On Chinese Stock*



- Market : Panel Models With Two-Sided Censors. *Journal Of Economic & Financial Studies*, 2(5), 1–5
- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. (2016), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian.
- Dewi, K.S. dan Yasa, G.W. (2020), "The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 2, hal. 280.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harahap, Sofyan Syafri. (2002). "Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan", Jakarta : PT Raja Grfindo Persada.
- Hidayat, A.T. dan Fitria, E.F. (2018), "Pengaruh Capital intensity, Inventory intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak", *Eksis*, Vol. 13 No. 2, hal. 157–168.
- Indradi, D. (2018), "Pengaruh Likuiditas, Capital intensity Terhadap Agresivitas Pajak ( Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.)", *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol. 1 No. 1, hal. 147.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2011), "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen", Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305– 360.
- Kamul, I. dan Riswandari, E. (2021), "Pengaruh Gender Diversity Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak", *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, Vol. 4 No. 2, hal. 218.
- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 1 (18), 58-66.
- Luke dan Zulaika. (2016), "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2014)", *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 13 No. 1, hal. 80–96.
- Maulana, I.A. (2020), "Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate", *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, Vol. 12 No. 1, hal. 13–20.
- Multazam, S. dan Rahmawaty. (2018), "Halaman 494-504 ol.x, No.x", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 3 No. 3, hal. 1.
- Nugraha, N.B. (2015), *Corporate Social Effects Responsibility, Company Size, Profitability, Leverage and Capital intensity To Tax Agresivity*, Diponegoro *Journal of Accounting*, Vol. 4.
- Santoso, Y.I (2020), "Akibat penghindaran pajak, Indonesia merugi Rp 68,7 triliun per tahun", [Kontan.co.id](https://newssetup.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-merugi-rp-687-triliun-per-tahun), tersedia pada: <https://newssetup.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-merugi-rp-687-triliun-per-tahun>.
- Santoso, Y.I (2020), "Industri manufaktur dan keuangan penopang penerimaan pajak", [Kontan.co.id](https://newssetup.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-merugi-rp-687-triliun-per-tahun), tersedia pada:



<https://nasional.kontan.co.id/news/industri-manufaktur-dan-keuangan-penopang-penerimaan-pajak?page=2>.

Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017a), *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, 6 Buku 1., Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Siregar, R. dan Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, (No. 2), hal 1-17.

Sugeng, S., Prasetyo, E. dan Zaman, B. (2020), "Does capital intensity, inventory intensity, firm size, firm risk, and political connections affect tax aggressiveness?", *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 17 No. 1, hal. 78.

Suyanto dan Supramono, (2012). Likuidita, Leverage, komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.16, No.2 Mei 2012, hlm 167-177. Universitas Kristen Satya Wacana.

Sugiyono.(2011). "Metode Penelitian Pendidikan". Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Watts, R. L., and Zimmerman, J.L. (1990). "Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective." *American Accounting Association*, 131-156.

Wildan, M. (2020). "Momentum Covid-19 Perlu Dimanfaatkan untuk Tekan Penghindaran Pajak", [news.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id), tersedia pada:

Momentum Covid-19 Perlu Dimanfaatkan untuk Tekan Penghindaran Pajak ([ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id))

Wulansari, tutuik A., Titisari, K.H. dan Nurlaela, S. (2020), "Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak", *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, Vol. 5 No. 1, hal. 69–76.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)